

**PELATIHAN AKUNTANSI TERINTEGRASI PAJAK PASAL 23/26****Yoseph Agus Bagus Budi N, Wulan Sari, Yosephina Endang Purba**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Jakarta

E-mail: yoseph.agus@trisakti.ac.id

**Abstrak**

*Pembelajaran akuntansi dan pajak merupakan pembelajaran dua bidang yang berbeda. Akuntansi diajarkan terlebih dahulu, baru kemudian diajarkan perpajakan. Hal ini juga berlaku bagi mahasiswa/i jurusan akuntansi di hampir seluruh prodi akuntansi dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan akuntansi, Mereka belajar akuntansi pada semester pertama, berlanjut sampai mereka lulus SMK. Bagi mahasiswa/i jurusan akuntansi, pembelajaran akuntansi berurutan dari pengantar akuntansi 1 (PA1) dilanjutkan PA2. Setelah belajar PA1, siswa mulai belajar perpajakan. Pembelajaran dengan teknik berurutan, menjemukan dan kurang produktif. Solusi yang ditawarkan adalah belajar dengan sekaligus mengintegrasikan akuntansi dengan pajak, karena persoalan akuntansi dan pajak merupakan persoalan yang riil. Pelajaran akuntansi harus mulai mengenalkan pajak sejak awal. PkM ini dilakukan untuk meningkatkan soft skills lulusan SMK Akuntansi yaitu dengan integrasi pembelajaran akuntansi dan pajak sekaligus, diberikan terhadap sebagian anggota Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Jakarta. Para guru antusias karena kegiatan ini mendorong kemampuan mereka dan bersifat berkesinambungan. PkM ini menggunakan eksperimen pajak penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 Pajak Penghasilan. Para guru diberikan ketentuan yang berlaku, lalu akan disimulasikan transaksi yang terdapat dalam aturan yang berhubungan dengan jasa yang diatur dalam Pasal 23 UU PPh serta jasa lain yang diatur dalam ketentuan perpajakan (PMK 141, 2015).*

**Kata kunci:** *Pelatihan, Akuntansi, Terintegrasi, Pajak***Abstract**

*Accounting and tax learning are two different fields. Accounting is taught first, then taxation follows. This also applies to students majoring in accounting in almost all accounting study programs and Vocational High Schools (SMK) majoring in accounting. They learn accounting when they enter their first semester and continue until they graduate from SMK. For students majoring in accounting, learning accounting is sequential from introductory accounting 1 (PA1) to PA2. After studying PA1, students begin studying taxation (tax). Learning with sequential techniques, boring and less productive. The solution offered is learning while simultaneously integrating accounting with taxes, because both are related closely. Accounting and tax should be introduced from the beginning. This PkM is carried out to improve the soft skills of SMK accounting graduates, by integrating accounting and tax learning at the same time, given to members of the Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) in Jakarta. The teachers were enthusiastic because this activity boosted their abilities and was continuous. This PkM uses income tax experiments Article 23 and 26. The teachers are given the applicable provisions, then transactions will be simulated using the rules relating to services regulated in Article 23 and 26 of the Income Tax Law and regulation of PMK 141, 2015.*

**Kata kunci:** *Training, Accounting, Integrated, Tax*

## 1. PENDAHULUAN

Pembelajaran akuntansi baik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ataupun di perguruan tinggi (dalam program-program atau jurusan yang memiliki kewajiban atau pilihan akuntansi) hampir terjadi di seluruh Indonesia adalah dengan cara atau model berurutan atau metode dipisah. Sebagai contoh yang umum di SMK. Di SMK kelas satu penjurusan biasanya akan diberikan di kelas satu semester dua. Mereka yang memilih jurusan ilmu pengetahuan sosial (IPS) memiliki kesempatan belajar akuntansi. Mereka akan belajar akuntansi terlebih dahulu baru belajar pajak. Di kebanyakan bangku kuliah hal yang sama juga demikian. Mahasiswa jurusan akuntansi, sebagai contoh, akan mendapatkan pengantar akuntansi pada semester satu, lalu pada semester kedua mereka akan mulai mengambil mata kuliah pengantar perpajakan (di beberapa kampus dinamakan Perpajakan 1).

Hal ini menimbulkan kekosongan contoh riil aspek pajak, pengajaran menjadi kurang menarik, dan memboroskan waktu. Disamping itu, di dunia nyata semua akuntansi yang ada adalah akuntansi terapan, bukan akuntansi murni. Akuntansi terapan di sini ialah akuntansi yang dalam transaksinya sudah memasukkan unsur pajak, bukan akuntansi yang tanpa konsekuensi pajak. Kita mengetahui bahwa di dalam dunia kerja, transaksi itu dibagi ke dalam transaksi yang mengandung konsekuensi pajak, dan transaksi yang tidak mengandung unsur pajak.

Berdasarkan pengamatan mendalam, pembelajaran dalam semester sewaktu siswa mengambil mata kuliah akuntansi perpajakan, terdapat kebingungan yang besar dalam memahami keduanya, karena sistem pengajaran yang dipisah sebagaimana dibahas di atas. Hal ini disebabkan siswa tidak sejak awal diberikan pemahaman yang terintegrasi namun justru dilakukan secara terpisah. Hal ini merupakan kelemahan yang mendasar juga, yang jika ditelusuri lebih jauh, ternyata semua buku akuntansi yang dipakai mahasiswa di Indonesia, adalah berkiblat pada buku-buku akuntansi Amerika. Semua buku akuntansi Amerika tidak mengenalkan aspek pajak Indonesia. Akibatnya, kesadaran para siswa tentang pajak terabaikan. Padahal kesadaran ini sangatlah penting, mengingat anggaran pendapatan negara sebagian besar berasal dari pajak. Akibatnya ketika belajar akuntansi perpajakan, siswa seperti harus diberikan pengayakan yang berulang, sepertinya mereka tidak memiliki fondasi yang kuat dalam memahami persoalan yang memang tidak mudah. Untuk itu, sebenarnya sangatlah baik jika dilakukan eksperimen kelas, sebagaimana diungkapkan dalam riset tentang bagaimana meningkatkan literasi pajak (Mayburov dan Leontyeva, 2017). Dalam riset itu terdapat kesimpulan penting bahwa format pelatihan pajak apa pun akan mendorong tanggapan yang positif. Memperkenalkan kursus literasi pajak ke semua program gelar akan meningkatkan pendapatan pajak dan mengurangi penggelapan pajak (terlihat dalam eksperimen). Selanjutnya, cukup banyak perbedaan dalam respon siswa terhadap metode pengajaran yang berbeda (Mayburov dan Leontyeva, 2017)

Sebagai gambaran narasi pembelajaran pengantar akuntansi dengan buku karangan penulis Amerika yang beredar di Indonesia dan digunakan hampir oleh seluruh jurusan akuntansi, sebagian besar pembahasan masalah akuntansi pajak baru akan diberikan dalam semester empat, dan selalu terdapat siswa yang mengalami kebingungan atau tertinggal. Pembelajaran pengantar akuntansi memang diberikan dalam semester pertama (pengantar akuntansi 1) dan semester kedua (pengantar akuntansi 2). Dalam semester pertama yang mana siswa mendapatkan pembelajaran pengantar akuntansi, mereka diharapkan sudah mendapatkan fondasi dasar dari proses bisnis yang dimulai dari transaksi yang paling sederhana.

Sebagai rujukan untuk pengantar akuntansi, jika dianggap sebagai pokok-pokok pengajaran pengantar akuntansi (principles of accounting atau elementary accounting),

yang diambil dari buku-buku karangan penulis Amerika seperti **Weygandt, Kimmel dan Kieso** yang buku-bukunya beredar di Indonesia, urutan pembelajaran adalah sebagai berikut. Bab 1 berisi prinsip akuntansi dan praktek. Dalam bab ini dikenalkan prinsip yang sangat mendasar yang terkenal dengan persamaan akuntansi, yang paling sederhana ialah aset = utang dan modal. Namun dalam bab pertama ini sebenarnya sudah ada transaksi yang menggambarkan terjadinya utang gaji atau pembayaran gaji. Dalam persamaan akuntansi, transaksi pembayaran gaji merupakan pembayaran yang belum dihubungkan dengan persoalan pajak, yakni utang pajak, yang sudah harus diperhitungkan dengan Pasal 21 dalam UU Harmonisasi Perpajakan serta aturan yang berlaku.

Oleh sebab itu diperlukan pembelajaran akuntansi dan pajak secara lebih awal yang dapat diintegrasikan, bukan dipelajari secara terpisah. Namun demikian, akuntansi pajak merupakan akuntansi yang rumit, sesuai dengan tingkatan pemahaman yang telah dicapai dalam pembelajaran siswa. Akuntansi pajak melayani seluruh transaksi yang terjadi dalam bisnis, dan tidak mungkin untuk menyelesaikan dalam ruang pelatihan pengajaran yang terpenggal. Oleh sebab itu, dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini, fokus pembahasan ialah bagaimana mengintegrasikan akuntansi dengan pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 26.

Peroalan yang mengemuka tersebut telah diidentifikasi dengan pengamatan mendalam di kelas-kelas pengantar akuntansi, pengantar perpajakan, dan akuntansi perpajakan. Dengan pembelajaran akuntansi dan pajak secara lebih dini, diharapkan softskill lulusan meningkat, sebagaimana diungkapkan dalam riset mengenai Persepsi Pengguna Jasa Lulusan Program Sarjana Akuntansi (Murtanto, et. 2022), riset kepuasan pengguna lulusan program studi (Kisworo et.al), dan hasil riset tentang perlunya menciptakan kurikulum pendidikan terutama pada jejang SMK yang sesuai dengan ketersediaan pasar kerja (Zoraya dan Wulandari, 2021).

Tiga persoalan telah disimpulkan dan diujicobakan pencarian solusinya melalui kegiatan PkM. Rangkuman permasalahan dan solusi yang ditawarkan dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Permasalahan dan Solusi

O	Permasalahan	Solusi
	Pembelajaran aspek pajak yang kurang dini di pelajaran (pengantar) akuntansi menyebabkan lemahnya pemahaman akuntansi per(pajak) pada siswa akuntansi	Pembelajaran aspek pajak perlu segera diberikan pada saat siswa belajar pengantar perpajakan
	Buku-buku akuntansi kiblata Amerika tidak mempertimbangkan aspek pajak di Indonesia	Membimbing mitra/guru terlibat dalam pengayakan transaksi akuntansi yang sudah memperhatikan unsur pajaknya.
	Belum ada rencana dari jurusan untuk mengadopsi pengajaran yang terintegrasi sejak dini	Diperlukan pelatihan dan modul tersendiri, agar akuntansi perpajakan untuk siswa akuntansi sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan

MGMP selama ini selalu berupaya agar para muridnya yang lulus dari SMK jurusan akuntansi dapat diterima di pekerjaan dengan bekal kompetensi yang cukup memadai

walaupun belum dapat dikatakan bagus dan terampil. Para guru juga berusaha agar lulusannya jangan sampai menjadi Not in Education, Employment, or Training (NEET), yakni seseorang yang berusia antara 15 hingga 24 tahun dengan kondisi menganggur karena tidak sedang menempuh pendidikan, bekerja, atau pelatihan sebagaimana diungkap dalam penelitian mengenai karakteristik kaum muda pada pasar tenaga kerja dan determinan NEET di Indonesia (Zoraya dan Wulandari, 2021). Usaha dan upaya yang dilakukan oleh MGMP, adalah menjawab seruan Kementerian Tenaga Kerja dalam mengurangi NEET, sebagaimana satu dasawarsa yang lalu, sebuah laporan dari kawasan Eropa, menggarisbawahi, bahwa tingkat pengangguran dan NEET yang tinggi menunjukkan bahwa mencari pekerjaan bagi bagi kaum muda saat itu susah (Mascherini et.al, 2012). Sebagai akibat dari krisis, bahkan yang paling berpendidikan dan terampil pun harus berjuang keras untuk menyesuaikan transisi dari pendidikan ke pekerjaan, sebagaimana digambarkan dalam riset tentang NEETs kawasan Eropa European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Mascherini et.al, 2012).

Pembangunan human capital lulusan SMK yang memadai dalam menjawab kebutuhan lapangan kerja telah menjadi diskursus stakeholder SMK di Jakarta, dengan para guru yang tergabung dalam MGMP, sebagai salah satu komponen utama stakeholders.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan suatu PkM biasanya melibatkan kegiatan yang berkesinambungan. Kegiatan PkM ini juga merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Sebagai kegiatan yang terencana, PkM ini merupakan kegiatan yang melalui tiga tahapan yakni input, proses, dan output. Tahapan input menjadi langkah awal (starting poin). Sebelum melakukan kegiatan, tim melakukan koordinasi dan menghubungi mitra (Musyawarah Guru Mata Pelajaran, disingkat MGMP). Termasuk dalam tahapan input adalah penentuan materi yang akan disajikan, bentuk pelatihan, tanggal dan waktu pelatihan, jumlah Tim PkM Trisakti, jumlah peserta. Tahapan ini disebut tahapan analisis situasi yang menghasilkan perumusan masalah dan alternatif solusi yang dapat diberikan. Hasil analisis pada tahap ini adalah bahwa lulusan SMK jurusan akuntansi membutuhkan pelatihan akuntansi yang lebih berbasiskan pada transaksi riil yang ada dalam bisnis. Hal ini diperlukan oleh dunia kerja.

Dalam tahapan kedua, yaitu tahap proses, pelaksanaan dilakukan dengan melakukan penyuluhan melalui edukasi berbasis pelatihan soal, dengan mengacu pada PMK Nomor 141 Tahun 2015. Pelatihan berbasis soal diawali dengan penjelasan mengenai pentingnya melihat transaksi bisnis dari persepektif pajak, karena yang dihadapi dalam dunia nyata adalah bahwa transaksi bisnis hampir selalu mengandung konsekuensi pajak. Sekedar contoh, pembayaran jasa pembukuan/akuntansi, jika penyedia jasa (Wajib Pajak Badan, dalam contoh ini) sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka pembayaran tersebut akan terutang PPh Pasal 23 sekaligus Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam pelaksanaan penyuluhan tersebut, disampaikan juga model atau pendekatan penyelesaian masalah (solusi) yang dilakukan dalam PkM ini adalah penyampaian materi tentang tentang beberpa hal: (1) pentingnya pengajaran akuntansi yang berbasis materi aktual, yakni sudah terintegrasi dengan dunia usaha yang terkait dengan pajak; (2) pentingnya tidak melakukan dikotomi pengajaran antara akuntansi dan pajak, khususnya PPh pasal 23 dan atau pasal 26; (3) perlu melakukan pelatihan mandiri bagaimana

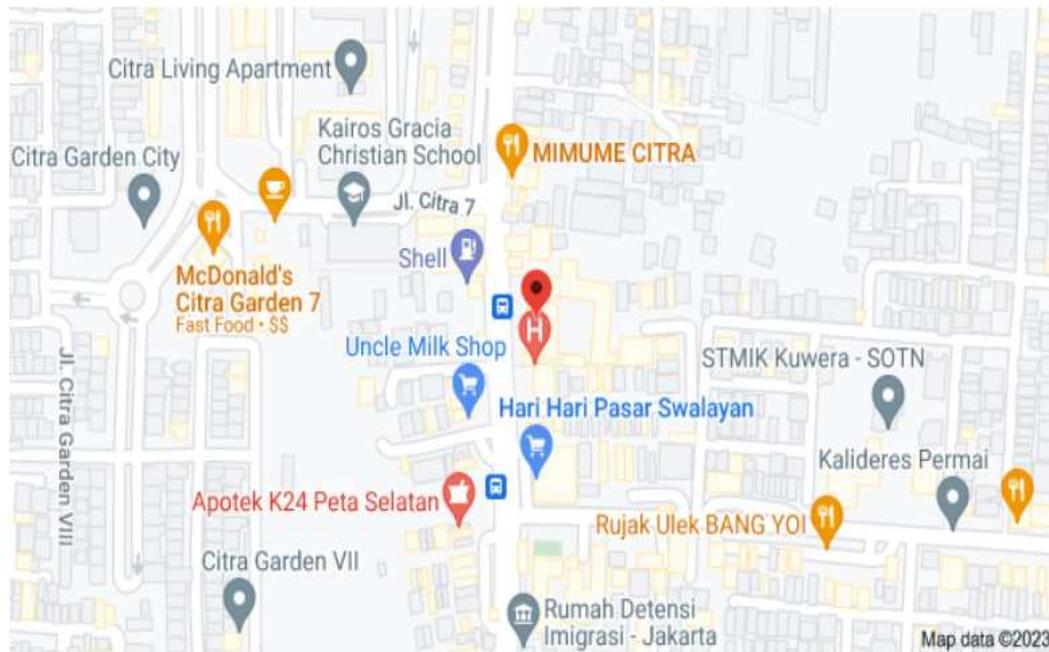
melakukan proses pembelajaran akuntansi Ph 23 dan 26 yang benar; (4) perlu berani melakukan evaluasi terhadap capaian dalam pembelajaran yang terkait dengan integrasi akuntansi dan PPh 23/26, (5) perlu mencari cara cara baru agar pembelajaran akuntansi yang sudah diintegrasikan dalam pajak pasal 23 dan 26 menjadi menarik.

Untuk memperlengkapi lulusan SMK jurusan akuntansi siap bekerja (sebagian dari mereka bekerja sambil kuliah malam), disampaikan juga hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa faktor eksternal (dunia kerja) membutuhkan calon pekerja yang cepat mengikuti derap langkash usaha, sekalipun dari hasil pembicaraan biasanya lulusan SMK ini masih bekerja pada perusahaan kecil dan menengah, sebagaimana digambarkan dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah. SMK dan jurusan akuntansi harus berani berbenah diri memperbaiki faktor internal. Simulasi transaksi melalui PMK 141 Tahun 2015 ini merupakan salah satu rangkaian mengasah ketrampilan atau softskills sebagai kompetensi ketrampilan, disamping kompetensi pengetahuan dan sikap.

Kegiatan PkM yang dilakukan oleh tim yang meliputi keahlian bidang-bidang ekonomi, keuangan, pemasaran dan akuntansi serta pajak. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari tim tenaga kependidikan, dimaslum, mahasiswa, dan alumni. Gambar 1a menampilkan kegiatan tim PkM dan mitra saat proses kegiatan dilaksanakan berikut lokasi kegiatannya.



Gambar 1. Foto Kegiatan



Gambar 2. Peta Lokasi

Motto yang dicanangkan oleh setiap insan guru adalah, menjadi pembelajar pedagogic adalah *longlife learning process*. Untuk itu tahapan akhir dalam PkM ini adalah evaluasi agar mitra (MGMP) lebih berkembang, bukan merupakan babak ahir dari sebuah akhir rangkaian bagi mereka dan kami. Rangkaian kegiatan PkM ini menjadi bernilai lebih jika terdapat kesinambungan. Sekedar sebagai contoh, topik bersambung dari PkM ini misalnya, integrasi akuntansi dengan PPh Pasal 21, Pasal 22, dan sebagainya. Kegiatan ini tentunya harus dapat menjadi pendorong pembelajaran pada yang lainnya, dengan berbagai instrument atau cara antara lain, pemberian motivasi maupun sebagai rangkaian pelatihan yang lain, baik bersifat keilmuan atau praktis. Kegiatan ini memberikan luaran berupa laporan kegiatan, hak cipta, dan publikasi artikel di jurnal. Rangkaian kegiatan terrefleksi dalam diagram alir pelaksanaan program ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Diagram Alur Pelaksanaan PkM

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 HASIL

Pelaksanaan PkM yang dilakukan dengan pelatihan edukatif dengan penyuluhan (via presentasi online karena situasi Covid-19 yang belum reda) lebih fokus dilakukan dengan simulasi transaksi untuk menambah wawasan dan ketrampilan dalam pencatatan (jurnal) dan pemahaman pada transaksi riil yang mengacu pada konsekuensi perpajakan. Awalnya mitra beranggapan bahwa dengan jurnal berikut implikasinya, sudah cukup membawa anak didik siap memasuki jenjang tenaga kerja pemula. Namun hal tersebut tidaklah benar sama sekali. Edukasi tim PkM melalui penyuluhan dan pelatihan simulatif akuntansi PPh 23 dan PPh 26 merupakan upaya menambah nilai lebih pada *human capital* siswa-siswi SMK. Aktifitas ini diharapkan menambah keterterimaan mereka dalam dunia kerja sebagai pekerja pemula. Proses kegiatan PkM ini, dengan ilustrasi transaksi yang sudah disiapkan sebelumnya diharapkan lebih memampukan mereka memahami dan mencatat transaksi bisnis yang sebenarnya.

Aktifitas ini, sebenarnya juga dapat dimaknai sebagai aktifitas yang cukup unik, untuk mendapatkan pengalaman baru, dalam pembelajaran akuntansi, dengan sudah

memasukkan unsur perpajakan. Apalagi jika dalam kelas bisa didatangkan praktisi yang mampu menjelaskan sisi praktek akuntansi di dalam transaksi berkonsekuensi pajak. Sebagaimana dinyatakan (dalam kesimpulan) di riset tentang inovasi pengajaran akuntansi tingkat dasar, “ Di dalam konteks/latar belakang bisnis baru, pengajaran "Akuntansi Dasar" sudah sangat berbeda dari masa lalu. Desain kurikulum tidak hanya terbatas pada pengajaran teoritis dan pelatihan praktis. Siswa (dan guru!) dituntut untuk lebih berjiwa inovatif dan kreatif dalam pelatihan, sehingga siswa menumbuhkan bakat dalam aplikasi inovatif yang komprehensif . Ketika siswa terlibat dalam pekerjaan akuntansi, mereka tidak hanya memiliki teori yang kaya pengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan praktis yang solid dan kualitas moral yang memadai (kompetensi sikap, menurut SKKNI)” (Li, 2022). Secara holistik, pelatihan ini juga diharapkan mampu mendorong kinerja kompetensi teknis pajak, sebagaimana digambarkan dalam studi mengenai team based learning, “Pembelajaran Berbasis Tim (TBL) membantu hasil pendidikan. Tim menghasilkan kinerja teknis tingkat tinggi dengan kinerja yang meningkat dari waktu ke waktu. Sedangkan partisipasi standarnya lebih rendah daripada kinerja teknis. Hal ini meningkat secara signifikan dalam durasi semester. Selain itu, TBL menghasilkan tingkat kepuasan yang tinggi bagi siswa. Selanjutnya, TBL mendorong pengembangan kelompok, keterampilan umum, dan hal ini sangat membantu pemberi kerja” (Kenny, 2013).

Gagasan dan teknik pengayaan pembelajaran akuntansi yang diinseminasikan dengan konsekuensi pajak tidak lahir secara mendadak. Setelah melakukan pengamatan atas lulusan akuntansi selama bertahun-tahun mengajar dan berkomunikasi dengan pengguna secara intens, menemukan bahwa pembelajaran pengantar akuntansi yang mengabaikan unsur konsekuensi pajak justru menjadi salah satu sebab lemahnya kemampuan teknis (kompetensi teknis) mereka. Mengutip dua alasan perspective learning yang ditulis oleh Kolb. Yang pertama adalah mengaitkannya dengan asal-usul gagasan intelektual karya Dewey, Levin, dan Piaget. Alasan kedua adalah untuk menekankan peran sentral pengalaman dalam proses pembelajaran (Kolb 1984). Sekedar sebagai gambaran kecil, model Lewinian menyoroti dua catatan penting dan berarti dalam learning model. Pertama, penekanan pada ke-kini-an dan pengalaman konkrit untuk memvalidasi dan melakukan pengetesan konsep abstrak. Pembelajaran pengantar akuntansi yang abstrak menjadi lebih bumi dan mudah dipegang-diingat, jika dihubungkan dengan peristiwa konkrit, yang dalam hal ini, disertakan konsekuensi pajaknya. Kedua, diperlukan proses feedback, yang oleh Kolb (1984) ditulis dengan sebutan action research dan laboratory training. (Kolb, 1984). Tujuan dari action research dan laboratory training adalah untuk mengintegrasikan dua persepektif tersebut menjadi proses pembelajaran yang efektif dan berorientasi pada capaian.

Gagasan untuk memasukkan unsur pajak ke dalam pengantar akuntansi dilandasi oleh kebutuhan pasar akan lulusan yang memiliki kecukupan kompetensi teknis. Disamping itu, penekanan pajak sejak dini, mampu mendorong kesadaran pajak (tax awareness) siswa, yang nantinya akan menjadi pembayar pajak yang patuh. Selain itu, metode pembelajaran terkait akuntansi dan pajak terus mengalami perkembangan dalam praktek atau penelitian. Satu penelitian berbasis simulasi yang masih relevan saat ini ialah riset yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengajar dan siswa (undergraduate) dalam pengajaran hukum pajak secara eksperimental (Kenny 2013). Melalui simulasi, dengan pendekatan team based learning (TBL) ditemukan bahwa TBL menghasilkan banyak manfaat bagi mahasiswa dan dosen. TBL membantu produktivitas pendidikan. Tim menghasilkan kinerja teknis (kompetensi teknis) tinggi yang meningkat dari waktu ke waktu. TBL menghasilkan tingkat kepuasan yang tinggi untuk siswa. Selanjutnya, TBL

mendorong pengembangan kelompok, keterampilan umum, dan lebih bermanfaat dari sisi pemberi kerja

### 3.2 PEMBAHASAN

Dari interaksi dan diskusi dengan peserta (para guru), diperoleh gambaran jelas bahwa mereka membutuhkan contoh atau ilustrasi yang memadai, termasuk dalam PkM ini adalah berkaitan dengan transaksi yang berhubungan dengan PPh Pasal 23. Mewakili obyek (yang jenisnya mencapai puluhan), tarif dan mekanismenya sebagaimana diatur dalam PMK 141/PMK.03/2015, urutan pembahasan dilakukan menggunakan semacam road map pembahasan, agar dalam contoh yang sederhana dapat dilakukan pengayakan secara mandiri setelah PkM berakhir.

Dari road map tersebut diambil contoh berdiskusi tentang Jasa penyedia tenaga kerja untuk keamanan (diambil dari PMK 141/03/2015 jenis jasa dalam huruf ac). Dalam contoh, misalnya, PT. Aman Secure merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk keamanan (satpam) . PT. Aman Secure mendapat kontrak penyediaan tenaga kerja satpam sebanyak 20 orang dari PT. Maju Sejahtera. Tenaga .kerja satpam tersebut tetap merupakan pegawai PT. Aman Secure. Dalam Kontrak disepakati bahwa pembayaran atas penyerahan jasa oleh PT. Aman Secure dengan rincian tagihan berupa gaji untuk 20 orang satpam per' bulan sebesar Rp 40.000.000, 00 dan imbalan atas jasa penyediaan satpam per bulan sebesar Rp 4.000.000, 00. Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja akan dihitung berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Hitunglah pajak pasal 23 yang terutang dan PPN yang harus dipungut. Buatlah jurnal bagi PT. Aman Secure dan PT. Maju Sejahtera jika terdapat kondisi sebagai berikut: (sesuai dengan pedoman yang berlaku dalam PMK tersebut)

- Dalam hal ada bukti pendukung berupa daftar pembayaran gaji dan kontrak kerja atas rincian tagihan di atas sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23. Atas pembayaran yang dilakukan PT. Maju Sejahtera kepada PT. Aman Secure untuk jasa penyediaan satpam dipotong PPh Pasal 23 oleh P Maju Sejahtera setiap pembayaran per bulan sebesar:  $2\% \times \text{Rp}4.000.000, 00 = \text{Rp} 80.000, 00$
- Dalam hal tidak ada bukti pendukung, seperti daftar pembayaran gaji dan kontrak kerja atas rincian tagihan di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp44.000.000,00 sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh P Maju Sejahtera atas pembayaran kepada PT. Aman Secure adalah sebesar:  $2\% \times \text{Rp}44.000.000, 00 = \text{Rp}880.000, 00$

Transaksi yang dicatat oleh PT. Maju Sejahtera dan PT. Aman Secure, merupakan contoh transaksi yang lengkap dalam arti, peserta PkM diberikan wawasan aspek akuntansi sekaligus pajaknya, dari sudut pandang pihak yang mengakui beban, dan dari sudut pandang yang mengakui penghasilan.

Keunikan dari PkM ini, peserta dapat melakukan pelatihan mandiri dengan jenis obyek pajak yang sudah tercantum dalam PMK 141, dengan kreasi mandiri namun tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku, karena sebenarnya jenis obyek yang diatur dalam PMK 141

merupakan jenis jasa lain, yang tidak mungkin diatur dalam Pajak Penghasilan Pasal 23 (sebagai induk ketentuan pajak Pasal 23 ) secara rinci.

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan PkM dengan mitra MGMP yang dilakukan secara online ditujukan untuk memberikan pengayaan pembelajaran akuntansi yang sejak awal sudah berbasis pajak, dengan kekhususan pajak penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26. Teknik pengayaan baru ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih melekat dibandingkan pembelajaran yang sepotong-sepotong yang selama ini berdampak pada kompetensi guru dan siswa mata kuliah pengantar akuntansi 1 (satu) dan akuntansi 2 (dua), dan bisa dilanjutkan juga pada mata kuliah akuntansi menengah 1 (satu) dan 2 (dua) serta akuntansi lanjutan 1 (satu) dan 2 (dua). Upaya untuk menambah nilai lebih pada kompetensi siswa dalam transaksi berbasis pajak menurut pengakuan peserta dirasakan memberikan penyegaran baru yang lebih mudah diingat dan lebih aplikatif. Ketika siswa terlibat dalam pekerjaan akuntansi, mereka tidak hanya memiliki teori yang kaya pengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan praktis yang solid dan kualitas moral yang memadai, dan hal ini sesuai dengan kompetensi sikap, menurut SKKNI). Implikasi yang mendapat komentar secara langsung dari peserta ialah bahwa pelatihan ini mampu melihat transaksi riil sebenarnya secara lebih dekat dan inilah yang menurut peserta dibutuhkan siswa di dunia kerja. Implikasi praktis kedua, mereka membutuhkan secara lebih detil bahwa dunia pengajaran akuntansi seyogjanya lebih pada transaksi yang riil, dalam hal ini lebih mengacu pada konsekuensi pajak yang sebenarnya terjadi.

Secara akademis, hal ini perlu mendapatkan kelanjutan dalam bentuk umpan balik berupa penelitian kecil, yang dikhususkan melihat secara lebih detil, dengan bantuan gambar dan animasi, jika dipandang perlu, untuk mendapatkan bukti empiris teruji, bahwa metode pengayaan sebagaimana digambarkan di atas lebih mengenai sasaran dan lebih efektif. Implikasi dalam bentuk pengajaran dan pendidikan yang mendesak ialah mensegerakan agar diberikan pelatihan akuntansi di pengantar akuntansi 1 (satu) dan 2 (dua) dengan mengemukakan aspek pajak yang khas dengan transaksi bisnis atau praktek bisnis di Indonesia, dan mulai bernai meninggalkan buku-buku yang berorientasi teks book dari Amerika, yang pasti kurang cocok dengan jiwa akuntansi Indonesia. Bahan ajar di pengantar akuntansi 1 perlu dikembangkan dan dikaji bersama dengan kaprodi akuntansi.

Selain itu, pelatihan akuntansi berbasis pajak lainnya, misalnya akuntansi pajak penghasilan Pasal 22, yang dibutuhkan dalam pelajaran akuntansi perpajakan dapat diberikan pelatihan secara khusus. Misalnya akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 industri tertentu, yang selama ini belum diberikan dalam mata kuliah akuntansi perpajakan.

Untuk melanjutkan kegiatan PkM di dengan topik yang berhubungan dengan akuntansi pajak ke depan secara berkesinambungan, maka perlu keterlibatan secara serius dari pihak-pihak prodi untuk melakukan uji coba secara terus menerus supaya dampak peningkatan kompetensinya dapat dilihat secara nyata.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Kenny, P. (2011). Strategies for Tax Teaching: A Teams Based Approach. Available at SSRN 2341505.
- Kisworo, B., Utsman, U., Ilyas, I., & Siswanto, Y. (2018). Kepuasan Mahasiswa dan Pengguna Lulusan Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Semarang. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*.
- Kolb, D. A. (2013). The process of experiential learning. In *Culture and processes of adult learning* (pp. 138-156). Routledge.
- Li, Y. (2022). Teaching Innovation Practice of. *Curriculum and Teaching Methodology*, 5(14), 23-29.
- Mascherini, M., Salvatore, L., Meierkord, A., & Jungblut, J. M. (2012). NEETs-Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe.
- Mayburov, I., & Leontyeva, Y. (2017). EFFECTIVENESS OF TEACHING METHODS AIMED AT IMPROVING STUDENTS'TAX LITERACY. In *INTED2017 Proceedings* (pp. 3102-3108). IATED.
- Murtanto, M., Astuti, C. D., Yanti, H. B., & Noor, I. N. (2022). PERSEPSI PENGGUNA JASA LULUSAN PROGRAM SARJANA AKUNTANSI. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 267-280.
- Zoraya, E., & Wulandari, M. D. (2021). Karakteristik kaum muda pada pasar tenaga kerja dan determinan Neet di Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, 4(2), 28-39.